



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2021

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Kementerian dan Lembaga Non Kementerian wajib melaporkan akuntabilitas kerjanya, oleh sebab itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 sebagai alat penilaian kualitas kinerja yang diharapkan dapat mendorong etos kerja seluruh personil agar menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, laporan akuntabilitas ini juga diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang baik dan berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik dalam melaksanakan pembangunan Kependudukan dan KB untuk mendukung pencapaian terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri, Bermartabat (MANTAB).

Selanjutnya Kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas kami ucapkan terima kasih atas bimbingan dan pengarahannya dan juga kepada para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan semua pihak yang telah banyak menyumbangkan pemikiran dan masukan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas pada tahun mendatang.

Muara Beliti, Januari 2022
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUPARDIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19680205 199401 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum OPD	2
Tentang Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	
1.3 Sumber Daya	7
1.4 Permasalahan yang dihadapi OPD Tahun 2021	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Uraian Singkat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program	
Jangka Menengah (RENSTRA-OPD)	9
2.2 Uraian Rencana/Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	14
AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi / OPD	16
A.1. Uraian Perbandingan Capaian Antara Target dan	
Realisasi Tahun 2021.....	16
A.2. Uraian Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun Lalu	
dan beberapa tahun terakhir dengan Capaian Kinerja Tahun	
2021.....	18
A.3. Uraian Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021	
dengan Target Akhir Renstra.....	20
A.4. Uraian Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021	
dengan Standar Nasional.....	22
A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau	
Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Sasaran serta	
Alternatif Solusi yang dilakukan.....	22
A.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	23
A.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang	

	Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	24
	B. Realisasi Anggaran	26
BAB IV.	PENUTUP	
	4.1 Kesimpulan.....	27
	4.2 Langkah OPD Pada Masa Yang Akan Datang.....	27
	LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020-2024, maka BKKBN menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2020-2024 dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Implementasi akuntabilitas kinerja diwujudkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui penerapan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang menyeluruh pada setiap tingkat unit kerja. Secara garis besar Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu :

1. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan.
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga.
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

Aspek tersebut menjadi sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi dan pengawasan pada setiap unit kerja dengan tujuan terciptanya kinerja yang akuntabel.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan salah satu lembaga daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas memiliki 3 (tiga) urusan pokok, yaitu :

1. Urusan Pengendalian Penduduk
2. Urusan Keluarga Berencana
3. Urusan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Dalam pencapaian 3 (tiga) urusan pokok tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas yaitu sebagai berikut :

1. Persentase Dokumen perencanaan, Penganggaran, pelaporan Kinerja dan Keuangan serta pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai Peraturan
2. Kumulatif Nilai rata-rata Dimensi Kompetensi dan Kualifikasi ASN DPPKB
3. Nilai Rata-rata Dimensi Kinerja DPPKB
4. Nilai Rata-rata Dimensi Disiplin ASN DPPKB
5. Cakupan Anggota BKB yang Ber-KB
6. Cakupan Anggota keluarga Lansia yang aktif
7. cakupan Anggota BKR Ber-KB
8. Persentase UPPKS yang Aktif
9. Persentase Rumah data kependudukan Paripurna yang terbentuk di kampung KB
10. Persentase stekholder yang menerapkan kebijakan/Keputusan Pengendalian penduduk
11. Persetase ketersediaan Data, Informasi dan Pemetaan pengendalian Penduduk yang mutakhir
12. Persentase faskes yang siap melayani KB MKJP
13. Indeks Kepuasan Layanan Fasiliasi KB
14. Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 Tahun
15. Persentase kampung kb dengan katagori purna

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan arah pembangunan pemerintahan 2020-2024, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Sejalan dengan arah pembangunan pemerintahan, dalam Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Musi Rawas yang tertuang dalam RPJMD 2020-2024, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan Pembangunan Kependudukannya didukung oleh Misi 2 Kabupaten Musi Rawas, yaitu "Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas" dengan arahan Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing dan berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Implementasi akuntabilitas kinerja diwujudkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui penerapan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang menyeluruh pada setiap tingkat unit kerja.

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu :

1. Berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk.
2. Berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan.
3. Mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan pedesaan.

4. Penyediaan data dan informasi penduduk.
5. Penyerasian kebijakan kependudukan.

Aspek tersebut menjadi pendukung sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi dan pengawasan pada setiap unit kerja dengan tujuan terciptanya kinerja yang akuntabel. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan salah satu lembaga daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas memiliki 3 (tiga) urusan pokok, yaitu :

1. Urusan Pengendalian Penduduk
2. Urusan Keluarga Berencana
3. Urusan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan tugas pembantuan yang di berikan Pemerintah Pusat.

1.2 GAMBARAN UMUM OPD

A. Tentang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas yang merupakan amandemen UU No. 10 tahun 1992 telah mengubah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan pertanggungjawaban langsung kepada Presiden. Dalam UU No. 52 tahun 2009 disebutkan, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota harus membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) sebagaimana OPD yang mengurus masalah kependudukan dan KB. Bagi program KB, Undang-Undang ini menjadi payung hukum yang kuat. Pemerintah pusat dan daerah secara tegas diwajibkan meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan kontrasepsi kepada masyarakat.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu lembaga daerah yang berperan sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Nomenklatur Lembaga/Instansi KB dibuat tersendiri

tanpa bergabung dengan instansi lainnya, yaitu dengan nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008) dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Musi Rawas No. 49 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.

B. Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas sesuai Peraturan Bupati Musi Rawas No. 49 tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Masing - masing Bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
 2. Sub Koordinator Advokasi dan Penggerakan; dan
 3. Sub Koordinator Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
 - b. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
 2. Sub Koordinator Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana (KB); dan
 3. Sub Koordinator Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana (KB).
 - c. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 2. Sub Koordinator Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
 3. Sub Koordinator Bina Ketahanan Remaja.

- d. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahkan :
1. Sub Koordinator Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
 2. Sub Koordinator Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan
 3. Sub Koordinator Data dan Informasi.

C. Kedudukan Dinas

Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Peraturan Bupati Musi Rawas No. 49 tahun 2016 adalah :

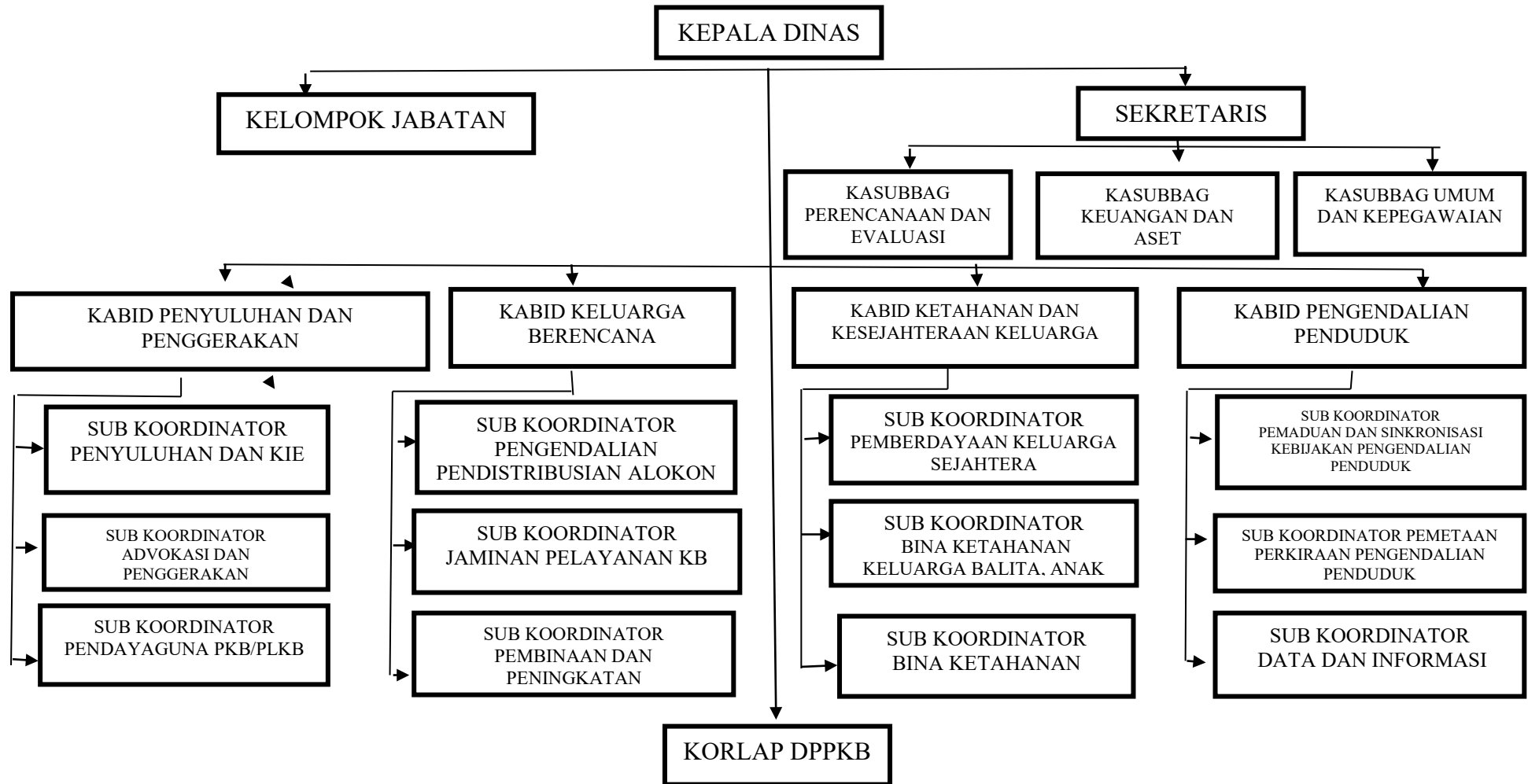
1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan asas otonomi dan tugas tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB)/Petugas Lapangan KB (PLKB) dan kader KB;

7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8. Pelaksanaan pelayanan KB, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Gambar I-1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN MUSI RAWAS**



1.3 SUMBER DAYA

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas per 31 Desember 2021 berjumlah 55 Orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1 – 1.2.

Tabel 1.1. Jumlah Sumber Daya Manusia/Personalia Diklasifikasikan Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Esselon II	1
2.	Esselon III	5
3.	Esselon IV (Sub Koordinator)	11
4.	Staf	15
5.	Fungsional PKB/PLKB Pusat	23
	Jumlah	55

B. SARANA PENUNJANG

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya. Bangunan gedung kantor terdiri dari 1 (satu) lantai seluas 363 M² yang terletak diatas tanah seluas 1.990 M² di Jalan Sulaiman Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Agropolitan Center.

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubeler, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Dalam Tahun Anggaran 2021 terdapat pengadaan peralatan kantor yang terdiri dari :

Tabel 1.2 Pengadaan Barang Peralatan dan Mesin Tahun 2021

No.	Jenis Barang	Jumlah (Bh/Unit)
1	Lemari Arsip Jati	14 Unit
2	Meja 1 Biro	14 Unit
3	Kursi Rapat Stenlis	84 Unit
4	Perangkat Boardband Internet Satelit	14 Paket
5	Layar Proyektor	14 Paket
6	Smart TV Android	14 Paket

1.4 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OPD TAHUN 2021

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki 2 (dua) Fungsi Utama sekaligus. *Pertama*, Laporan akuntabilitas merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan Kepala Perwakilan BPKP. *Kedua*, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Dua fungsi utama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut merupakan cermin maksud dan tujuan penyusunan dan Penyampaian LKjIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 adalah sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dengan meminimalisir permasalahan yang dihadapi tahun 2022 ini. Adapun permasalahan yang dihadapi tersebut, antara lain :

1. Masih tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) antar wilayah
2. Masih tingginya peserta KB yang putus pakai (Drop Out)
3. Belum optimalnya cakupan pelayanan KB pasca persalinan
4. Masih rendahnya pemahaman ibu-ibu tentang usia ideal menikah
5. Masih rendahnya pemahaman ibu-ibu yang punya balita untuk ikut program BKB
6. Masih Kurangnya ibu-ibu Akseptor untuk ikut menjadi kelompok UPPKA
7. Kepedulian isu kependudukan hanya dapat dilakukan dikampung KB saja, sedangkan di lingkungan pendidikan kurang peserta pembinaan kebijakan dan strategi Dalduk (penyusunan Grand Design Kependudukan) tidak dapat dilaksanakan

**BAB
II**

Perencanaan Kinerja

2.1 URAIAN SINGKAT TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM JANGKA MENENGAH (RENSTRA-OPD).

Rencana Strategis sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Suatu Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas merupakan suatu perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan perencanaan yang terarah, efektif dan berkesinambungan, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada.

A. Tujuan dan Sasaran

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas yaitu meningkatnya cakupan pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui KB dengan uraian seperti berikut :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
Tujuan		
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

Sasaran		
1.1	Meningkatnya Kesertaan Pengguna Aktif Metode Kontrasepsi Modern	Prevalensi Peserta KB Aktif (CPR)
1.2	Menurunnya Angka Kelahiran	Angka Kelahiran Kasar (CBR)
1.3	Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
1.4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas PPKB	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas PPKB

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas menetapkan sejumlah Strategi dan Kebijakan yaitu :

Tabel 2.2. Strategi dan Kebijakan

No (1)	Strategi (2)	Kebijakan (3)
1	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga. b. Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga. c. Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. d. Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW. e. Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
2	Menguatnya pemanduan dan sinkronisasi kekbijakan pengendalian penduduk	<ul style="list-style-type: none"> f. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan g. Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/ informasi kependudukan

3	Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif	<ul style="list-style-type: none"> h. Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/ jejaring yang melayani KBKR i. Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR j. Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR diwilayah dan sasaran khusus k. Peningkatan KB Pria
4	Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana	<ul style="list-style-type: none"> l. Peningkatan kinerja tenaga penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/ Sub PPKBD

D. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas adalah :

Tabel 2.3. Rincian Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor

			Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undang
			Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
			Penyediaan Jasa Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
2	Program Pengendalian Penduduk	Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI, dan SLTP/MTS, Jalur nonformal dan informal
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
			Pengelolaan dan Pelaporan Data pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja
			Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Masa Cetak dan elektronik serta Media Luar Ruang

		<p>Pelaksana Mekanisme Operasional program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokal karya(Minilok)</p> <p>Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK</p> <p>Pengendalian Program KKBPK</p>
	<p>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</p>	<p>Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakkan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)</p> <p>Penggerakan Kader institusi masyarakat (IMP)</p>
	<p>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringannya</p> <p>Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)</p> <p>Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP</p> <p>Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya</p>

		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB Pembinaan Terpadu Kampung KB
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluraga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<p>Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)</p> <p>Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)</p> <p>Promosi dan Sosialisasi kelompok kegiatannketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan konomi keluarga/UPPKS)</p>

2.2 URAIAN RENCANA / PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Rencana/Perjanjian/Penetapan Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah / unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah / tanggung jawab/ kinerja. Rencana/Perjanjian/Penetapan Kinerja Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 disajikan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Rencana/Perjanjian/Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program
1	2	3	4
Meningkatnya Kesertaan Pengguna Aktif Metode Kontrasepsi Modern	Prevalensi Peserta KB Aktif (CPR)	19,03	Bidang Pengendalian Penduduk
Menurunnya Angka Kelahiran	Angka Kelahiran Kasar (CBR)	77,44	Bidang Keluarga Berencana
Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas	indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	51,3	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas PPKB	Nilai SAKIP DPPKB	72.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
	Indeks Profesionalisme ASN DPPKB	60.64	

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI / OPD

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran strategis berikut indikator kerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2021 ini.

IKU yang ditetapkan untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas telah digunakan sebagai indikator keberhasilan dan analisis pencapaian sasaran kinerja sebagaimana direncanakan dalam Penetapan Kinerja Tahun yang diuraikan dalam analisis capaian kinerja.

Pencapaian kinerja Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana kabupaten Musi Rawas untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi dan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

A.1 Uraian Perbandingan Capaian Antara Target dan Realisasi Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	5	6
Menurunnya Angka Kelahiran	Angka Kelahiran Kasar (CBR)	19,03	15,97	119,16
Meningkatnya Kesertaan Pengguna Aktif Metode Kontrasepsi Modern	Prevalensi Peserta Kb Aktif (CPR)	77,44	77,86	100,54
Meningkatnya Keluarga yang	indeks Pembangunan	51,3	52,56	102,45

Berkualitas	Keluarga (iBangga)			
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas PPKB	Nilai SAKIP DPPKB	72,1	74,03	102,68
	Indeks Profesionalisme ASN DPPKB	60,64	62,07	107,35

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	5	6
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Anggota BKB yang Ber-KB	70.00	68,22	97,45
	Cakupan Anggota keluarga Lansia yang aktif	89.46	62,66	70,04
	cakupan Anggota BKR Ber-KB	69.82	71,20	101,97
	Persentase UPPKS yang Aktif	45.00	78,26	173,91
Program Pengendalian Penduduk	Persentase Rumah data kependudukan Paripurna yang terbentuk di kampung KB	30	30	100
	Persentase stekholder yang menerapkan kebijakan/Keputusan Pengendalian penduduk	5	5	100
	Persentase ketersediaan Data, Informasi dan Pemetaan pengendalian Penduduk yang mutakhir	100	100	100

Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase faskes yang siap melayani KB MKJP	75.25	100	132,89
	Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi KB	70.00	80,00	114,28
	Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 Tahun	1.24	1,29	104.03
	Persentase realisasi Peyuluhan dan KIE yang sesuai rencana	70.20	100	142.45
	Persentase kampung kb dengan katagori purna	30	36	120

A.2. Uraian Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir dengan Capaian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Menurunnya Angka Kelahiran	Angka Kelahiran Kasar (CBR)	19,03	20,0	20,45	15,03	19,06	18,98	78,03	104,93	107,74
Meningkatnya Kesertaan Pengguna Aktif Metode Kontrasepsi Modern	Prevalensi Peserta Kb Aktif (CPR)	77,44	72,58	72,28	77,86	77,34	76,94	100,54	106,56	106,45
Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas	indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	51,3	-	-	52,56	-	-	102.45	-	-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

Program	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Anggota BKB yang Ber-KB	70.00	84	83	68,22	84,6	81,96	97,45	100,71	98,75
	Cakupan Anggota keluarga Lansia yang aktif	89.46	-	-	62,66	-	-	70,04	-	-
	cakupan Anggota BKR Ber-KB	69.82	-	-	71,20	-	-	101,97	-	-
	Persentase UPPKS yang Aktif	45.00	86	85	78,26	85	86,01	173,91	98,84	101,19
Program Pengendalian Penduduk	Persentase Rumah data kependudukan Paripurna yang terbentuk di kampung KB	30	-	-	30	-	-	100	-	-
	Persentase stakeholder yang menerapkan kebijakan/Keputusan Pengendalian penduduk	5	5	5	5	5	5	100	100	100
	Persentase ketersediaan Data, Informasi dan Pemetaan pengendalian Penduduk yang mutakhir	100	100	100	100	100	100	100	-	-
Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase faskes yang siap melayani KB MKJP	75.25	70	-	100	70	-	132,89	100	-
	Indeks Kepuasan Layanan Fasiliasi KB	70.00	-	-	80,00	-	-	114,28	-	-

Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 Tahun	1.24	1,82	1,83	1,29	1,03	2,33	97,45	176,70	78,58
Persetase realisasi Peyuluhan dan KIE yang sesuai rencana	70.20	70	-	100	70	-	101,97	100	-
Persentase kampung kb dengan katagori purna	30	-	-	36	-	-	120	-	-

A.3. Uraian Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target 2026	Capaian (%)
2021						
1	2	3	4	5	6	7
Menurunnya Angka Kelahiran	Angka Kelahiran Kasar (CBR)	19,03	15,03	119.16	18,88	125,61
Meningkatnya Kesertaan Pengguna Aktif Metode Kontrasepsi Modern	Prevalensi Peserta Kb Aktif (CPR)	77,44	77,86	100,54	77,94	100,10
Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas	indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	51,3	78,97	153,94	56,3	71,29
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas PPKB	Nilai SAKIP DPPKB	72.1	74.03	102.68	74.03	100
	Indeks Profesionalisme ASN DPPKB	60.64	64.93	107.07	66.3	102.1

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target 2026	Capaian (%)
2021						
1	2	3	4	5	6	7
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Anggota BKB yang Ber-KB	70.00	68,22	97,45	71.25	104,44
	Cakupan Anggota keluarga Lansia yang aktif	89.46	62,66	70,04	89.56	142,93

	cakupan Anggota BKR Ber-KB	69.82	71,20	101,97	69.92	98,20
	Persentase UPPKS yang Aktif	45.00	78,26	173,91	50.00	63,88
Program Pengendalian Penduduk	Persentase Rumah data kependudukan Paripurna yang terbentuk di kampung KB	30	30	100	45	150
	Persentase stekholder yang menerapkan kebijakan/Keputusan Pengendalian penduduk	5	5	100	10	200
	Persentase ketersediaan Data, Informasi dan Pemetaan pengendalian Penduduk yang mutakhir	100	100	100	100	100
Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase faskes yang siap melayani KB MKJP	72.05	100	132,89	80.50	80,5
	Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi KB	70.00	80,00	114,28	80.25	100,31
	Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 Tahun	1.24	1,29	97,45	1.19	92,24
	Persentase realisasi Peyuluhan dan KIE yang sesuai rencana	70.20	100	101,97	70.70	70,7
	Persentase kampung kb dengan katagori purna	30	36	120	40	111,11

A.4. Uraian Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kabupaten 2021			Nasional 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Menurunnya Angka Kelahiran	Angka Kelahiran Kasar (CBR)	19,03	15,03	78,03	-	-	-
Meningkatnya Kesertaan Pengguna Aktif Metode Kontrasepsi Modern	Prevalensi Peserta Kb Aktif (CPR)	77,44	77,86	100,54	62,16	57,00	91,70
Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas	indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	51,3	52.56	102.45	55,00	54,01	98,20

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar sasaran yang ditetapkan pada tahun 2021 terealisasi dengan baik. Hal ini didukung dengan semakin meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan pra sarana serta regulasi yang ada baik di tingkat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.

A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Sasaran serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran seperti yang dijelaskan di atas antara lain didukung oleh :

- Tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas yang cukup memadai;
- Kedudukan organisasi dan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas yang cukup strategis sebagai pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran strategis telah dilaksanakan dengan maksimal.

Namun demikian, ada beberapa indikator yang walaupun pencapaiannya sudah baik namun masih perlu ditingkatkan. Belum tercapainya target yang ditetapkan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

Kendala yang Dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah :

1. Masih tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) antar wilayah
2. masih tingginya peserta KB yang putus pakai (Drop Out)
3. Belum optimalnya cakupan pelayanan KB pasca persalinan
4. Masih rendahnya pemahaman ibu-ibu tentang usia ideal menikah
5. Masih rendahnya pemahaman ibu-ibu yang punya balita untuk ikut program BKB
6. masih Kurangnya ibu-ibu Akseptor untuk ikut menjadi kelompok UPPKA
7. Kepedulian isu kependudukan hanya dapat dilakukan dikampung KB saja, sedangkan di lingkungan pendidikan kurang peserta pembinaan kebijakan dan strategi Dalduk (penyusunan grand Design) tidak dapat dilaksanakan

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, maka diambil langkah-langkah antisipatif/ solusi sebagai berikut:

1. Meningkatkan frekuensi pelaksanaa KIE dan pelayanan KB bergerak melalui Tim Unit Mobil Pelayanan ke daerah GALCITAS dan Momentum
2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) penyuluhan KB/PLKB dan kader dalam pelaksanaan KIE dan penggerakan pelayanan KB di setiap wilayah Balai Penyuluh KB Kecamatan dan memaksimalkan Pengendalian dan Distribusi Alkon ke Fasilitas Kesehatan
3. Meningkatkan advokasi kepada tokoh Formal dan non formal di masyarakat tentang kontrasepsi
4. Melakukan pembinaan secara kontinu pada kelompok BKR
5. Melakukan pembinaan secara kontinu pada kelompok BKB
6. Melakukan pembinaan secara kontinu pada kelompok UPPKA

A.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN YANG DIHAPUSKAN/ TIDAK EFEKTIF	ALASAN UTAMA	NILAI ANGGARAN
1	2	3	4
1	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan	Rp. 29,267,700

A.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja khususnya indikator kinerja utama adalah :

Sasaran	Program/ kegiatan	Indikator	Keterangan
1	2	3	4
Menurunnya Angka Kelahiran	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengendalian Penduduk - Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota 	Angka Kelahiran Kasar (CBR)	<ul style="list-style-type: none"> - Angka Kelahiran Kasar dapat ditekan/ tercapai disebabkan karena sudah cukup baiknya pencapaian MKJP yaitu sebesar 100 % sehingga dapat menjarangkan kelaahiran pada ibu yang berdampak pada turunya angka kelahiran kasar (CBR), selain itu dibantu juga oleh giatnya pelaksanaan pembinaan program ketahanan keluarga melalui poktan khususnya BKB dan BKR, dengan memberikan Penyuluhan dan KIE yang sesuai dengan rencana dan kebutuhan PUS di setiap Desa serta Khususnya di Kampung KB
Meningkatnya Kesertaan Pengguna Aktif Metode Kontrasepsi Modern	<ul style="list-style-type: none"> - Program Keluarga Berencana - Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota 	Prevalensi Peserta Kb Aktif (CPR)	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Kegiatan- Kegiatan yang dimanfaatkan untuk Pelayanan KB - Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Lancar, sehingga persediaan Alat dan Obat Kontrasepsi selalu Mencukupi baik di Faskes, Maupun di jejaring dan jejaringan Faskes - Adanya Pelayanan KB bergerak baik Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan, sehingga bisa meningkatkan Masyarakat yang tidak bisa datang ke Faskes - Besarnya KIE dan Konseling KB oleh penyuluh KB/ PLKB dan Kader KB

<p>Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas</p>	<p>- Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>- Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p>	<p>indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)</p>	<p>- Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang iBangga, dengan demikian banyaknya jawaban positif dari 3 pertanyaan tentang iBangga (Dimensi Ketentraman, Kebahagiaan, Kemandirian)</p>
--	--	--	--

B. REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi pelaksanaan rutin, pembangunan dan penerimaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas untuk Tahun Anggaran 2021 meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran Belanja Operasional.
- b. Realisasi Anggaran Belanja Modal.

Adapun rincian untuk masing-masing diuraikan di bawah ini :

A. Realisasi Anggaran Belanja Operasional

Realisasi Anggaran Belanja Operasi (31 Desember 2021) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas adalah sebesar Rp 10.022.751.177 ,- atau 90,70% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp. 11.050.748.929,-. Realisasi Anggaran Belanja Operasional mengalami sisa anggaran sebesar Rp. 9.875.024.659,-.

B. Realisasi Anggaran Belanja Modal

Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas untuk Tahun Anggaran 2021 (sampai dengan 31 Desember 2021) sebesar Rp. **1.031.700.000,-** atau **98,26%** dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar **Rp. 1.050.000.000,-** Lebih jelasnya tabel rincian berdasarkan program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa (Rp)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	5.824.598.879	5.633.360.927	96,72	191.237.952
2.	Program Pengendalian Penduduk	1.978.200	1.978.200	100,00	0
3.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.379.480.450	4.560.515.650	84,78	818.964.800
4.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluraga Sejahtera (KS)	894.691.400	858.596.400	95,97	36.095.000

**BAB
IV**

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas secara umum telah dilaksanakan mengacu pada RENSTRA 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD Pemkab Musi Rawas. Dari uraian laporan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Capaian kinerja tahun 2021 dengan nilai capaian tertinggi 173,91% dan terendah 70,04 %, angka tersebut menunjukkan ada peningkatan keberhasilan yang dicapai dari tahun sebelumnya. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan mengalami penurunan pencapaian, hal ini dikarenakan masih tingginya tingginya PUSMUPAR (PUS Muda Varietas Rendah);
2. Realisasi Anggaran Belanja Operasi sebesar **Rp 10.022.751.177,-** serta Belanja Modal sebesar **Rp 1.031.700.000- .**

4.2 LANGKAH OPD PADA MASA YANG AKAN DATANG

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, maka strategi pemecahan masalah atau langkah yang dilakukan antara lain :

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana petugas lapangan dalam menjangkau calon peserta KB yang tidak terlayani;
- b. Memaksimalkan kegiatan Gerakan Kampung KB yang merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama lintas sektor dalam mendukung MURA MANTAB;
- c. Meningkatkan kegiatan penggerakan, khususnya pada kelompok kegiatan;
- d. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap kinerja pegawai melalui media rapat staf serta meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- e. Memenuhi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan sehingga pelaksanaan kerja dapat memenuhi kriteria waktu, mutu dan hasil sesuai dengan target kinerja;

- f. Pengembangan SDM perencana dengan cara pendidikan dan pelatihan perencanaan sehingga SDM dapat kompeten dan bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsinya;
- g. Meningkatkan disiplin pegawai staf Badan KB Kabupaten Musi Rawas sesuai manajemen personalia;
- h. Menjalin koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait dilingkungan Pemkab Musi Rawas
- i. Menata budaya kerja yang kondusif dengan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan tentram.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Sulaiman Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Muara Beliti 31661
Telepon/Fax (0733) 4540123 – Website: www.bkb.musirawaskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHANTAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. SUPARDIYONO**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MUSI RAWAS**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RATNA MACHMUD**
Jabatan : **BUPATI MUSI RAWAS**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,


RATNA MACHMUD

Muara Beliti, Oktober 2021

PIHAK PERTAMA,


Drs. SUPARDIYONO
Pembina Utama Muda
NIP.19680205 199401 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHANTAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menurunnya Angka Kelahiran	Angka Kelahiran Kasar (CBR)	19,03
2	Meningkatnya Kesertaan Pengguna Aktif Metode Kontrasepsi Modern	Prevelensi peserta KB Aktif (m-CPR)	77,44
3	Meningkatnya Kesertaan Pengguna Aktif Metode Kontrasepsi Modern	indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	51,3
4	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintah	Nilai SAKIP DPPKB	72,1
		Indeks Profesionalisme ASN DPPKB	60,64

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.824.598.879	APBD-P
2 Program pengendalian Penduduk	Rp 1.978.200	APBD-P
3 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 5.379.480.450	APBD-P + DAK
4 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 894.691.400	APBD-P + DAK

BUPATI MUSI RAWAS


RATNA MACHMUD

Muara Beliti, Oktober 2021

KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA


Drs. SUPARDIYONO
Pembina Utama Muda
NIP.19680205 199401 1 001